

AGRESI MILITER II

Tanggal 20 Juli 1947 Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati dengan melakukan aksi serangan militer yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Peristiwa ini membuat Dewan Keamanan PBB turun tangan dan membentuk Komisi Jasa Baik atau Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri wakil-wakil dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Masing-masing anggota KTN adalah Frank Graham (Amerika Serikat), Richard Kirby (Australia), dan Paul Van Zeeland (Belgia) (K.M.L. Tobing, 1986: 24). Lalu, pada tanggal 17 Januari 1948, dengan disponsori oleh KTN, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda telah berhasil menandatangani sebuah Perjanjian Renville. Seperti yang diketahui penamaan perjanjian itu karena dilaksanakan di atas geladak kapal perang Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Tanjung priuk, Jakarta sebagai tempat Netral.

Agresi Militer Belanda tidak lepas daripada isi Perjanjian Renville. Menurut Notosutardjo (1956: 193-199) isi dari Persetujuan Renville secara garis besar terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan gencatan senjata yang antara lain berisi ketentuan diterimanya garis demarkasi Van Mook.
2. Dasar-dasar Politik Renville yang pada pokoknya berisi kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai dan dengan bantuan KTN.
3. Enam pasal tambahan dari KTN yang diantaranya berisi ketentuan bahwa kedaulatan atas Indonesia tetap di tangan Belanda selama masa peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada pihak Negara Indonesia Serikat (NIS).

Persetujuan Renville tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Sedangkan, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Sementara, anggota KNT yaitu Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham. Seiring perjalanan waktu, perjanjian Renville juga mengalami kegagalan yang disebabkan oleh pengakhiran secara sepihak oleh Belanda, karena Belanda menuduh Republik Indonesia tidak serius dalam melaksanakan daripada isi Perjanjian Renville (Reid, 1974). Dalih Perjanjian Renville yang sudah tidak dapat diteruskan oleh karena pelanggaran dari pihak Indonesia, maka Belanda kembali melancarkan serangan militer kepada pihak Indonesia yang disebut Agresi Militer Belanda II.

Penyerangan Lapangan Terbang Maguwo

Keinginan Belanda untuk segera melancarkan Agresi militer Belanda diperkuat dengan adanya pernyataan Kerajaan Belanda kepada PBB. Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda yang diwakili oleh Dr. Beel menyatakan kepada PBB bahwa mulai tanggal 19 Desember 1948 pukul 00.00 waktu Jakarta tidak lagi terikat oleh perjanjian Renville (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 2010: 33). Jenderal Spoor sebagai Panglima Tentara Belanda mendukung putusan Belanda untuk segera melakukan serangan. Jenderal Spoor juga telah mempersiapkan rencana penyerbuan. Rencana serbuan Belanda kedua terhadap Indonesia telah dipersiapkan dengan matang. Belanda mempersiapkan konsep Umum Operasi militer Belanda dengan sandi "Kraai" (Operasi gagak). Syarat utama bagi berhasilnya operasi Belanda ini adalah tentang kecepatan bergerak dan sebanyak mungkin menawan pegawai-pegawai RI.

Hal itu dilakukan agar pusat pemerintahan RI dapat dipatahkan. Terutama Yogyakarta yang dianggap penting bagi Belanda. Hal tersebut dikarenakan Yogyakarta merupakan pusat dari pemerintahan Indonesia. Belanda berpendapat bahwa dengan melumpuhkan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan maka dapat dengan mudah menguasai Republik Indonesia. Tujuan dari operasi Belanda dapat tercapai apabila dengan melakukan serangan dadakan. Rencana serangan dadakan tersebut dengan menerjunkan para pasukannya di Yogyakarta. Penerjungan dilakukan dengan melihat pertimbangan medan yang ada di wilayah Yogyakarta. Yogyakarta tidak memiliki pelabuhan dikarenakan letaknya yang bersebelahan dengan Samudra Hindia yang bergelombang besar. Jika melalui sungai, Yogyakarta juga tidak memiliki sungai yang cukup besar untuk dilewati kapal-kapal militer Belanda (Ibid).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya Belanda memutuskan untuk melakukan serangan melalui lapangan udara Maguwo. Lapangan udara Maguwo mendapat serangan dari Belanda karena lapangan udara dianggap daerah penting bagi Belanda. Lapangan udara Maguwo merupakan sarana Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan daerah luar. Sehingga apabila lapangan udara Maguwo dapat cepat dilumpuhkan maka hubungan Yogyakarta dengan luar akan segera terputus. Persiapan penyerangan terhadap lapangan udara Maguwo dilakukan di lapangan udara Andir, Bandung. Sebelum melakukan serangan, pada tengah malam tanggal 18 Desember 1948 Belanda memutus hubungan komunikasi Yogyakarta dengan Jakarta. Tujuan dari pemutusan hubungan komunikasi tersebut agar serangan Belanda tidak diketahui oleh pihak RI yang ada di Jakarta.

Serangan Terhadap lapangan udara Maguwo terjadi pada waktu fajar sekitar pukul 06.00 WIB tanggal 19 Desember 1948. Beberapa pesawat pemburu serta pesawat Mustang, Kittyhawk, Loceed, dan Mitchel melakukan tembakan dan pengeboman. Bangunan-bangunan penting di lapangan Udara Maguwo seperti kompleks tentara untuk menghentikan kegiatan TNI di bom dan ditembaki dengan senapan mesin. Pertahanan Indonesia dalam menanggapi serangan Belanda dipimpin oleh Kadet Udara Kasmiran. Serangan yang mendadak menjadikan tidak adanya persiapan dari pasukan yang bertugas menjaga lapangan udara di Maguwo. Meskipun tidak seimbang bila dilihat dari jumlah pasukan dan perlengkapan perang, namun para penjaga lapangan udara Maguwo melawan dengan gigih serangan Belanda. Lapangan udara Maguwo akhirnya berhasil dikuasai Belanda setelah berhasil melumpuhkan pertahanan pasukan Indonesia disana.

Alasan lapangan udara Maguwo dapat diduduki oleh Belanda (Ki Nayono, op. cit: 131-132):

1. Persiapan bumi hangus yang sudah lama yakni sejak bulan Agustus direncanakan untuk semua lapangan AURI tidak dapat dilaksanakan untuk Maguwo karena hal ini tidak dibolehkan oleh Menteri Pertahanan karena perundingan-perundingan antara Belanda dan Indonesia. Hal ini menyangkut keberatan pihak militer KTN mendarat di atas lapangan yang telah siap untuk dibumihanguskan. Persetujuan Menteri Pertahanan dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) memutuskan bahwa akan dipasang alat peledak berupa bom-bom dengan detonator. Pemasangan detonator tersebut untuk personil terlatihpun masih membutuhkan waktu satu sampai dua jam, sehingga bom-bom tersebut mustahil dipasang karena semua yang bergerak di tanah ditembaki dari udara oleh Belanda.

2. Kemudian adanya kekurangan sistem alat-alat pengawasan udara yang modern seperti radio, radar, dan sebagainya. Hal itu secara praktis adanya serangan Belanda yang menadadak tidak dapat diketahui. Lalu, kekurangan pula alat-alat penangkis udara 12,7 mm sampai 20 mm karena sebagian dari alat-alat tersebut sedang dipinjam Angkatan Darat dalam rangka tindakan pengamanan pemberontakan PKI di Madiun.

3. Selain itu, tidak cukupnya anggota personil pertahanan udara, sebab menurut perhitungan kelayakan, untuk dapat mempertahankan suatu pangkalan udara terhadap serangan pasukan Belanda paling sedikit diperlukan kekuatan satu batalyon, namun pihak tentara Indonesia tidak memilikinya.

Belanda yang sudah menguasai Maguwo lalu melanjutkan agresi ke Yogyakarta. Belanda menerjunkan pasukan “M” yang diterbangkan dari Semarang. Pasukan ini terdiri atas Batalyon I Resimen Infantri 15, Resimen S-5 Para I, dan Kompi Para KST (*Korps Specieale Tropen*) (SESKOAD, op. cit: 86). Laporan awal tentang serangan Belanda terhadap Maguwo diterima Panglima Besar Jenderal Sudirman yang masih dalam keadaan sakit. Panglima Besar segera menyusun perintah kilat untuk seluruh angkatan perang lewat petugas RRI Yogyakarta oleh Letnan Kolopaking agar disiarkan secepatnya, isinya (Rato Suwarno, 1985: 17):

(1) Kita telah diserang; (2) Tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan Maguwo; (3) Pemerintah Belanda membatalkan persetujuan gencatan senjata; (4) Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.

Penangkapan Para Petinggi

Dalam sidang kabinet RI yang dilakukan secara mendesak di Istana Presiden, Soekarno memutuskan untuk menyerahkan diri secara terhormat. Dengan demikian para menteri memutuskan untuk mengangkat menteri Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemimpin pemerintah darurat yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera. Sementara itu wakil Hatta masih mempersiapkan pernyataan resmi untuk urusan militer atas desakan Kolonel Simatupang agar tentara militer melanjutkan perjuangan, terlepas apapun yang terjadi pada pemerintah, dalam hal ini para petingginya yang sudah ditawan.

Sidang Kabinet pada saat itu memutuskan sebagai beberapa hal berikut:

1. Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota Kabinet yang lain tetap tinggal di Gedung Negara sebagai tawanan Belanda, agar opini dunia akan bersimpati kepada RI.

2. Memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk mendirikan Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

3. Tentara melanjutkan perjuangan gerilya dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

4. Menteri Negara Koordinator Keamanan, Sri Sultan tetap tinggal di kota.

Akhirnya pada tanggal 20 Desember 1948 Soekarno harus menghadapi panglima pasukan-pasukan Belanda di Jawa Tengah, Jenderal Meijer. Jenderal ini meminta kepada Soekarno supaya mengeluarkan perintah agar menghentikan perlawanan kepada TNI yang jelas ditolak mentah-mentah oleh Soekarno, dengan dalih cerdas karena ia kini berstatus sebagai tawanan yang tidak bisa memberikan perintah kepresidenan (Gede Agung, 1983: 210). Maka perlawanan terus berlanjut.

Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1948, Soekarno, Hatta, Syahrir, Mr. Assaat, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Komodor Udara Suriadarma diterbangkan menuju pulau Bangka. Disana Soekarno dan Syahrir dipisahkan dari yang lainnya dan diterbangkan ke Brastagi, kemudian ke Prapat sekitar Danau Toba (G.M. Kahin, 1995: 428). Sementara itu, Ibu kota Republik yang telah dikuasi Belanda membuat Gubernur Yogyakarta yang juga merangkap Menteri Koordinator Keamanan dan Wakil Kepala Daerah Paku Alam VIII meletakkan jabatannya untuk menjadi tawanan. Hal ini dimaksudkan agar segala hal yang terjadi di Yogyakarta adalah tanggung jawab Belanda yang telah menguasainya. Sri Sultan menginstruksikan kepada para pegawai Pamong Praja supaya dapat membantu TNI sebagai bantuan darurat militer. Instruksi ini adalah langkah persiapan untuk dapat melaksanakan perlawanan gerilya. (Poespaningrat, 1998: 213).

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Agresi Belanda Militer II tanggal 19 Desember 1948 yang diarahkan ke Ibu kota RI di Yogyakarta dapat secara total menguasai lapangan terbang Maguwo dan seluruh kota Yogyakarta (Sudharmono, S.H, 1981:192). Selain menduduki Yogyakarta, Belanda juga telah menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta yang diasingkan ke Bangka, dan beberapa petinggi lainnya seperti Agus Salim dan Mohammad Roem. Sebelum sempat ditahan, para petinggi pemerintahan sudah sempat mengadakan sidang kabinet dan mengambil keputusan untuk memberikan mandat melalui radiogram yang akan dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera. Mandat ini dikirim pada menit-menit terakhir sebelum Soekarno-Hatta ditawan. Mandat itu berisikan agar segera mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Adapun bunyi radiogram tersebut yaitu:

"Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06:00 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas Ibu Kota Djogjakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewadjibannya lagi, kami mengusahkan pada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra" (Suryanegara, 2010: 266).

Dengan tertangkapnya para petinggi Republik Indonesia lantas tidak berarti bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berakhir. Seluruh kekuatan TNI yang ada di Yogyakarta diperintahkan keluar kota untuk melakukan gerilya perang secara besar-besaran di kedua belah garis van Mook. Lalu, Wakil Presiden Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim mengirim radiogram kedua kepada Dr. Soedarsono, Palar, Mr. Maramis di New Delhi.

Isi radiogram lanjutan kedua tersebut yaitu:

"Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, jam 06:00 pagi, Belanda mulai serangannya atas Ibu Kota Djogjakarta. Djika ichtiar Mr. Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Goverment Republik Indonesia di India. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra. Djika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan seperlunya." (Suryanegara, 2010: 26).

Terlepas kontroversi sampai atau tidaknya radiogram itu, pada tanggal 22 Desember 1948 akhirnya terdengar kabar bahwa di desa Halaban dekat Payakumbuh, Sumatera Barat telah diadakan rapat dengan beberapa tokoh. Rapat tersebut akhirnya memutuskan telah berhasil membentuk Pemerintah Darurat.

Susunan kementrian PDRI yang dibentuk adalah sebagai berikut (Fidelara, 2010: 30):

Ketua PDRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Penerangan:

>> Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Wakil Ketua PDRI dan Menteri Kehakiman:

>> Mr. Soesanto Tirtoprodjo

Menteri Luar Negeri:

>> Mr. A.A. Maramis

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan:

>> Dr. Soekiman Wirjosandjojo

Menteri Keuangan:

>> Mr. Loekman Hakim

Menteri Kemakmuran dan PMR:

>> I. Kasimo

Menteri Agama:

>> K.H. Masjkoer

Menteri P dan K:

>> Mr. Teuku Mohammad Hasan

Menteri Perhubungan:

>> Ir. Inderatjaja

Menteri Pekerjaan Umum:

>> Ir. Mananti Sitompul

Menteri Perburuhan dan Sosial:

>> Mr. St. M. Rasjid

Dari fakta sejarah ini, jelas bahwa Mr. Sjafruddin Prawiranegara tidak menyalahgunakan amanah pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk mengangkat dirinya sebagai presiden PDRI, melainkan hanya sebagai Ketua PDRI.

Perang Gerilya

Setelah mengetahui kondisi kota Yogyakarta yang diserang bertubi-tubi oleh Belanda dan diperkirakan akan segera dikuasai oleh Belanda, maka Jenderal Sudirman yang tidak mau menyerah begitu saja segera meninggalkan kota untuk mengatur strategi dan memimpin pelaksanaan perang gerilya. Mereka segera menuju ke arah selatan melewati daerah Bantul dengan berkendara melalui jalur yang aman.

Rombongan yang menyertai Panglima Besar Sudirman ini antara lain Harsono Cokroaminoto sebagai penasehat politik, Kapten Suparjo Rustam sebagai ajudan, Kapten Cokropranolo sebagai pengawal pribadi, Dr. Suwondo sebagai Dokter pribadi, Heru Kesser, Utoyo Kolopaking, Hanum Faeni yang seorang ipar dari Sudirman, dan Ateng sebagai supirnya. Pada pukul 17.00 Sudirman dan beberapa pengawalnya sampai di Kretek setelah berjalan kurang lebih 20 km ke sebelah selatan kota Yogyakarta. Pada saat di Kretek, datanglah rombongan pengawal lain yang dipimpin Letda Basuki yang segera akan bergabung dengan rombongan Sudirman. Letda Basuki ini juga melaporkan bahwa Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan beberapa menteri lainnya gagal ke luar kota, sehingga mereka sudah ditawan Belanda. Sementara itu, perintah siasat Panglima Besar ini sudah harus segera mulai dilaksanakan mengingat situasi yang mendesak.

Mulai dari Kretek lalu melanjutkan perjalanan melalui Grogol, Panggang, Playen, Semanu, Bedoyo, Pracimantoro hingga ke Wonogiri. Setelah meninggalkan daerah Wonogiri rombongan langsung menuju ke Jawa Timur. Pada tanggal 23 Desember 1948 Sudirman dan para pengawal segera melanjutkan perjalanan menuju daerah Ponorogo. Sesampainya disana, Sudirman dikenal dengan nama samaran "Pak De". Setelah istirahat dan salat, rombongan segera menuju Trenggalek dan Kediri. Pagi hari pada tanggal 24 Desember 1948, Sudirman mengadakan pembicaraan dengan Kolonel Sungkono tentang langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Kediri bukanlah tempat yang aman untuk beristirahat dan memberikan komando, sehingga perlu segera meninggalkan kota tersebut dan menuju ke Desa Sukarame. Berselang sebentar saja dari rombongan Sudirman yang meninggalkan kota, tiba-tiba Kediri diserang tentara Belanda dari udara.

Agresi di Kediri itu tidak memakan waktu lama dan langsung dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itu, desa Sukarame menjadi tidak aman lagi untuk disinggahi, kemudian segera meninggalkan lokasi tersebut dan menuju desa Karangnongko. Pada tanggal 27 Desember 1948, Sudirman dan para pengawalinya meninggalkan daerah desa Karangnongko dan melanjutkan perjalanan ke Guwoliman, lalu terus berjalan lagi dan hanya istirahat beberapa hari, lalu hingga sampai Salamjudeg walaupun dengan medan yang sulit untuk di tempuh. Pada tanggal 9 Januari 1949 rombongan sampai di desa Jambu. Sementara sedang di desa Jambu, Suparjo Rustam diperintahkan untuk melakukan kontak dengan para menteri yang sudah ada di desa Wayang. Perjalanan Sudirman diteruskan ke Desa Wayang, lalu diteruskan lagi ke Desa Bayutowo. Belanda terus memburu Sudirman hingga terjadi pertempuran antara TNI dan Pengawal melawan pasukan patroli Belanda.

Perlawanan itu dilakukan untuk menghambat gerak maju pasukan musuh agar tidak dapat menangkap Sudirman. Ketika pertempuran berlangsung, Sudirman beserta para menteri segera pergi menuju desa Sedayu. Sama halnya di desa Sedayu, pasukan Belanda pun menyusulnya sehingga mereka dihadang lagi oleh para pasukan pengawal dan terjadi kontak senjata. Lalu, Sudirman dan sisa para pengawalnya segera lagi meninggalkan desa Sedayu untuk bersembunyi dengan masuk hutan dan naik gunung. Pagi harinya, rombongan Sudirman melanjutkan perjalanan menuju desa Warungbung, dilanjutkan lagi secara berurutan ke Gunungtukul, Ngindong, Sawo, Tumpakpelem, Longsor, Suruhwetan. Lalu, dengan mengendarai mobil, perjalanan berlanjut ke arah pantai selatan melewati desa Dongko, Panggul, Bedog, Nogosari, hingga ke daerah Pacitan. Setelahnya, melanjutkan Perjalanan lagi ke Pringapus.

Setelah transit di Pringapus, lalu bergegas lagi melalui desa-desa seperti Gebyur, Sobo, Tegalombo, Mejing, dan terakhir tiba di Ngambar. Nama Panglima Besar Sudirman yang disamarkan sebelumnya dengan sebutan Pak De lalu diubah kembali dengan nama samaran baru yaitu Abdullah Lelonoputro. Ketika di daerah Ngambar, Sudirman mendapat serangan dari Belanda sehingga rombongan harus berputar-putar terus untuk melindungi dan meloloskan diri. Akhirnya rombongan sampai di padukuhan Sobo pada tanggal 18 Februari 1949. Sobo adalah sebuah dukuh bagian dari Desa Pakis, dukuh ini terletak di sebelah tenggara lereng Gunung Lawu. Karena letaknya yang strategis untuk dijadikan markas, Sobo ditetapkan sebagai “Markas Besar Gerilya”. Pada tanggal 17 Maret 1949, Sudirman dan para pengawalnya meninggalkan Sobo dan bergerak ke arah Yogyakarta untuk menyerang balik Belanda (Sardiman, 2010).